



Analisis Tingkat Penerapan Manajemen Mutu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Faqih Ahmad Ramadhan ¹⁾, H. Asep Muslihat ²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstract

Received: 01 Januari 2024

Revised : 07 Januari 2024

Accepted: 14 Januari 2024

Quality healthcare services play a crucial role in improving the well-being of the community in Karawang Regency, Indonesia. However, the issue of healthcare service quality in the Health Department of Karawang Regency requires serious attention, including ineffective management systems, inadequate resources, limited accessibility to healthcare services, and a lack of compliance with established service standards. This article adopts a qualitative approach using literature review method to analyze the level of quality management implementation. The results of this analysis are expected to provide recommendations and solutions to enhance the effectiveness and efficiency of healthcare services in Karawang Regency. The differences between hospitals and community health centers (puskesmas) in healthcare service quality management also need to be considered, enabling the development of appropriate strategies and approaches. Periodic evaluations of quality management implementation in all healthcare units in Karawang Regency are also important to ensure continuous improvement in healthcare service quality.

Keywords: *quality management, healthcare services, Karawang Regency, hospitals, community health centers (puskesmas)*

(*) Corresponding Author: 2010631020078@student.unsika.ac.id

How to Cite: Ramadhan, F. A., & Muslihat, H. A. (2024). Analisis Tingkat Penerapan Manajemen Mutu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10637811>.

PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan kesehatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Karawang, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warganya.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, penerapan manajemen mutu yang baik di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menjadi sangat relevan.

Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2016, mengindikasikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah dalam sektor kesehatan di wilayah kabupaten/kota.

Tujuan utama Dinas Kesehatan ini adalah menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjelaskan peran penting Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan tingkat pertama di

wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki fokus utama pada upaya promosi dan preventif untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal.

Selain itu, Puskesmas juga diatur sebagai unit pelaksana teknis yang berafiliasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah tersebut juga menegaskan pentingnya peran Puskesmas dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi masyarakat Kabupaten Karawang.

Selain upaya promosi seperti penyuluhan, kampanye kesehatan, dan program-program lainnya, Puskesmas juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama. Hal ini mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, penanganan penyakit umum, dan pelayanan kesehatan keluarga.

Dengan demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas memainkan peran penting dalam mengorganisir dan melaksanakan pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

Upaya mereka meliputi aspek promosi, preventif, dan kuratif guna meningkatkan kesehatan masyarakat serta memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Selain itu, mereka juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan kesehatan serta pengembangan program-program baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Puskesmas menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat desa, dan mitra lainnya untuk membentuk sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif di tingkat kabupaten/kota.

Tujuannya adalah memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Karawang. Selain itu, mereka juga berupaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mendorong adanya inisiatif kesehatan masyarakat yang baru dan inovatif.

Peraturan-peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur dan memastikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Karawang.

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas dapat berperan secara efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memberikan akses pelayanan kesehatan yang optimal di wilayah tersebut.

Dalam menjaga kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat penting. Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai urusan pemerintah di bidang kesehatan di tingkat kabupaten, termasuk di Kabupaten Karawang.

Kualitas pelayanan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan menjadi faktor krusial dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

Namun, kualitas pelayanan Dinas Kesehatan di Kabupaten Karawang menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Mutu pelayanan kesehatan yang rendah dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Beberapa masalah yang dapat muncul antara lain adanya ketidakefektifan sistem manajemen, kurangnya sumber daya yang memadai, keterbatasan

aksesibilitas pelayanan kesehatan, dan kurangnya pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan.

Salah satu aspek penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang adalah adanya perhatian yang lebih besar terhadap aspek-aspek manajemen yang efektif dan efisien. Penyusunan perencanaan yang baik, pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pengawasan yang ketat, serta penerapan sistem evaluasi yang berkesinambungan perlu menjadi fokus utama. Dengan demikian, Dinas Kesehatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Selain itu, aksesibilitas pelayanan kesehatan juga menjadi masalah penting yang perlu diperhatikan di Kabupaten Karawang.

Jarak antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan pemukiman penduduk, terutama di daerah-daerah terpencil, dapat menjadi hambatan dalam memperoleh pelayanan yang tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan jaringan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Kabupaten Karawang.

Dalam konteks ini, analisis tingkat penerapan manajemen mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menjadi langkah strategis.

Data-data terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang yang diatur dalam peraturan bupati menjadi dasar yang relevan untuk menganalisis tingkat penerapan manajemen mutu.

Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penerapan manajemen kualitas di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Data-data yang relevan mengenai pelayanan kesehatan akan digunakan sebagai dasar analisis. Beberapa perundang-undangan yang terkait dengan isu ini akan menjadi acuan utama dalam penelitian ini, antara lain: UU Pembentukan Daerah Kabupaten, UU Pemerintahan Daerah, UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Kualitas Layanan Dasar.

Dalam melakukan analisis ini, peneliti akan mengidentifikasi sejauh mana Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan Dinas Kesehatan terhadap regulasi-regulasi yang telah disebutkan sebelumnya.

Melalui analisis tingkat penerapan manajemen mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, diharapkan dapat teridentifikasi upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana manajemen mutu diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses penerapan manajemen mutu, sementara metode pengumpulan data melalui tinjauan pustaka

akan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara terperinci konteks, pengalaman, dan persepsi yang terkait dengan penerapan manajemen mutu di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerapan manajemen mutu.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah tinjauan pustaka. Peneliti akan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis penelitian dan studi sebelumnya yang relevan dengan penerapan manajemen mutu di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Sumber data yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh dari tinjauan pustaka akan disintesis dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat penerapan manajemen mutu.

Prosedur penelitian melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, mengidentifikasi sumber data yang relevan melalui akses ke basis data akademik, perpustakaan, dan sumber-sumber lain yang tersedia.

Kedua, memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk dianalisis secara mendalam. Ketiga, menganalisis data yang diperoleh dari literatur menggunakan pendekatan kualitatif.

Peneliti akan mengidentifikasi pola, temuan, dan tema yang muncul dari tinjauan pustaka yang telah dilakukan. Keempat, interpretasi dan kesimpulan akan dibuat berdasarkan hasil analisis data dan akan dikaitkan dengan teori dan kerangka konseptual yang relevan.

Para ahli mengakui bahwa pendekatan kualitatif memiliki kelebihan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, dinamika, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen mutu secara menyeluruh.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan data yang mendalam dan kaya, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkat penerapan manajemen mutu di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Penerapan Manajemen Mutu

Manajemen mutu merupakan suatu pendekatan sistematis yang diterapkan oleh lembaga untuk meningkatkan kualitas layanan atau produk yang mereka sediakan.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, pengelolaan mutu memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan menghasilkan hasil yang diinginkan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi et al. (2013) dengan judul "Analisis Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Islam

Karawang" menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, manajemen mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Karawang dinilai cukup baik.

Rumah Sakit tersebut memiliki sistem manajemen yang baik dalam penanganan pasien. Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Beberapa pelayanan di rumah sakit telah mendapatkan akreditasi, namun terdapat beberapa permasalahan terkait pedoman kerja dan peraturan khusus yang belum sepenuhnya memenuhi standar manajemen mutu pelayanan kesehatan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, seperti jumlah perawat dan dokter yang belum memenuhi standar yang ada. Hal ini berdampak negatif pada kualitas pelayanan, seperti keterlambatan dalam penanganan pasien.

Sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh Sunandar et al. (2022) dengan judul "Manajemen Pengelolaan Obat di UPTD Puskesmas Cibuyaya" menemukan bahwa implementasi manajemen pengelolaan obat di UPTD Puskesmas Cibuyaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 dan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Hasil observasi dan wawancara mendalam menunjukkan tingkat kesesuaian manajemen pengelolaan obat sebesar 86%, dengan kategori sangat baik. Selain itu, sarana dan prasarana gudang penyimpanan obat juga dinilai baik dengan tingkat kesesuaian sebesar 79%, sementara proses penyimpanan obat mendapatkan tingkat kesesuaian sebesar 76% dengan kategori baik.

Dalam menganalisis tingkat penerapan manajemen mutu di Kabupaten Karawang, perlu diperhatikan bahwa terdapat variasi antara rumah sakit dan puskesmas dalam konteks pengelolaan mutu pelayanan kesehatan.

Perbedaan ini bisa disebabkan oleh perbedaan dalam skala, sumber daya, dan tingkat kompleksitas dari kedua jenis fasilitas kesehatan tersebut.

Oleh karena itu, dalam mengembangkan manajemen mutu di Kabupaten Karawang, diperlukan penyesuaian strategi dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing fasilitas kesehatan. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap penerapan manajemen mutu di semua unit pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang sangat penting guna memastikan adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Strategi dan Regulasi yang Berlaku

Berdasarkan Dokumen Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, sebuah naskah strategis yang dirancang untuk melaksanakan kemajuan kesehatan di Kabupaten Karawang, terdapat perhatian yang diberikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program-program dan sektor-sektor serta langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya.

Rencana strategis ini juga harus mempertimbangkan koordinasi yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Barat 2013-2018, RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, dan Rencana Strategis dari Unit Pelaksana Teknis Daerah lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Daerah memberikan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Karawang, wewenang yang lebih luas dalam mengatur urusan internal mereka sendiri.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas pemerintahan, mengembangkan daerah, dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Dokumen Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai panduan untuk mencapai koordinasi, sinergi, dan keberlanjutan dengan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

Naskah ini disusun dengan mengacu pada landasan hukum yang mengatur perencanaan pembangunan, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Secara keseluruhan, Dokumen Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 bertujuan untuk mencapai kemajuan kesehatan yang berkualitas, mengikuti kebijakan pembangunan nasional, reformasi sektor kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang kesehatan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDG).

Evaluasi Pelayanan Dinas Kesehatan

Dalam usaha meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang, Dinas Kesehatan telah melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil yang dicapai oleh rumah sakit di wilayah tersebut.

Evaluasi ini mencakup beberapa indikator kinerja yang meliputi tingkat pemanfaatan sarana, mutu, dan efisiensi pelayanan.

Salah satu indikator yang menjadi fokus dalam evaluasi ini adalah Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (Bed Occupancy Rate/BOR). BOR merupakan persentase penggunaan tempat tidur dalam suatu periode tertentu. Idealnya, nilai BOR sebaiknya berada dalam kisaran 60-85%. Dari data yang tercatat, ditemukan bahwa RS Citra Sari Husada mencapai tingkat BOR tertinggi sebesar 89,56%, sedangkan RSUD Amanda memiliki tingkat BOR terendah hanya 9,69%. Meskipun secara keseluruhan tingkat BOR di Kabupaten Karawang mencapai 63,17%, menunjukkan adanya pemanfaatan sarana yang relatif ideal, tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja RSUD Amanda agar dapat mencapai standar yang diharapkan.

Selanjutnya, indikator Bed Turn Over (BTO) mengukur frekuensi penggunaan tempat tidur dalam satu periode. Idealnya, dalam setahun, satu tempat tidur sebaiknya digunakan sekitar 40-50 kali.

Dalam evaluasi ini, RS Rosela mencapai frekuensi tertinggi dengan 155 kali penggunaan tempat tidur per tahun, sementara tingkat BTO di Kabupaten Karawang secara keseluruhan mencapai 75,47.

Meskipun tingkat BTO masih memenuhi standar yang diharapkan, rumah sakit di Kabupaten Karawang tetap perlu terus meningkatkan pemanfaatan tempat tidur untuk mencapai efisiensi yang lebih baik.

Selanjutnya, indikator Turn of Interval (TOI) menggambarkan rata-rata waktu penggunaan tempat tidur. Nilai TOI yang diinginkan berada dalam rentang 1-3 hari, menunjukkan bahwa tempat tidur tidak ditempati dalam jangka waktu yang lama.

Meskipun TOI di Kabupaten Karawang mencapai 1,78, yang termasuk dalam kisaran yang diinginkan, tetap ada beberapa rumah sakit yang memiliki TOI di bawah atau di atas standar yang diharapkan. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit, diperlukan upaya pengorganisasian yang lebih baik serta peningkatan permintaan dan penggunaan tempat tidur.

Selain itu, evaluasi juga melibatkan rata-rata lama hari perawatan (Length of Stay/LOS) sebagai indikator efisiensi dan mutu pelayanan. Secara umum, nilai LOS yang diinginkan adalah antara 6-9 hari. Namun, rata-rata LOS di Kabupaten Karawang mencapai 3,10, yang berada di bawah standar yang diharapkan.

Hal ini menunjukkan perlunya pengamatan lebih lanjut terkait mutu pelayanan, terutama dalam hal diagnosis tertentu. Oleh karena itu, penyusunan strategi yang efektif untuk memperbaiki LOS di rumah sakit menjadi penting guna meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan.

Selain indikator-indikator tersebut, metode pendekatan Barber Johnson juga digunakan untuk mengilustrasikan tingkat kinerja keseluruhan dalam pelayanan rumah sakit.

Metode ini menghasilkan komposit dari empat indikator, yaitu BOR, LOS, TOI, dan BTO.

Melalui grafik Barber Johnson, perpotongan dari keempat garis indikator tersebut memberikan gambaran apakah pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit sudah efisien atau tidak. Jika perpotongan garis berada dalam wilayah yang efisien sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit dapat dianggap efisien. Namun, jika perpotongan garis berada di luar wilayah yang efisien, maka diperlukan upaya menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan.

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya, Kabupaten Karawang telah melaksanakan berbagai program yang tergabung dalam Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). UKBM merupakan inisiatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berperan penting dalam pembangunan sektor kesehatan.

Kabupaten Karawang telah melakukan langkah-langkah konkret dalam menerapkan UKBM, antara lain melalui pendirian Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa), dan Desa Siaga Aktif.

Posyandu merupakan salah satu komponen utama dalam UKBM yang berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan primer yang melibatkan serta melibatkan masyarakat secara langsung di bawah pengawasan petugas kesehatan terkait. Program Posyandu yang diterapkan di Kabupaten Karawang mencakup sejumlah kegiatan prioritas, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Kabupaten Karawang telah berhasil mendirikan 2.311 Posyandu dengan tingkatan yang

berbeda, seperti pratama, madya, purnama, dan mandiri, untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang lebih luas dan merata.

Selain Posyandu, Kabupaten Karawang juga telah melaksanakan program Desa Siaga Aktif sebagai bagian dari UKBM. Desa Siaga Aktif merupakan status yang diberikan kepada desa yang dapat memastikan masyarakatnya memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar setiap hari, mengembangkan program UKBM, melaksanakan kegiatan pemantauan kesehatan berbasis masyarakat, memiliki kemampuan dalam penanganan keadaan darurat kesehatan, serta mengamalkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kabupaten Karawang telah berhasil mengubah seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya menjadi desa siaga aktif, dengan berbagai tingkatan pengembangan, seperti pratama, madya, purnama, dan mandiri, sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang optimal di seluruh wilayah.

Meskipun mayoritas desa siaga aktif berada pada tingkatan madya, beberapa desa di Kabupaten Karawang telah berhasil mencapai tingkatan mandiri.

Tingkatan mandiri menandakan bahwa desa tersebut telah memiliki tenaga profesional kesehatan yang tersedia setiap hari, forum kesehatan desa atau kelurahan yang aktif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola serta memperbaiki kesehatan.

Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan di seluruh wilayahnya dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dan pengembangan infrastruktur kesehatan yang memadai.

Dengan adanya program UKBM, Kabupaten Karawang berupaya memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduknya. Melalui Posyandu dan Desa Siaga Aktif, pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau dan terpadu dapat diberikan kepada masyarakat, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.

Dengan demikian, diharapkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang dapat terus meningkat seiring dengan kesadaran dan partisipasi yang semakin tinggi dalam program-program UKBM.

Kesimpulan

Dalam evaluasi tingkat pelaksanaan pengelolaan mutu di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, terdapat perbedaan dalam pendekatan manajemen mutu pelayanan kesehatan antara rumah sakit dan puskesmas.

Penelitian mengungkapkan bahwa manajemen mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Karawang dinilai memadai, meskipun terdapat beberapa isu terkait kebijakan operasional dan sumber daya manusia yang belum memenuhi standar.

Sementara itu, penerapan manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Cibuya dinilai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya penyesuaian strategi dan pendekatan dalam mengembangkan manajemen mutu di Kabupaten Karawang, serta perlunya evaluasi berkala untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dalam mutu pelayanan kesehatan di seluruh unit pelayanan di wilayah tersebut. Regulasi dan strategi yang telah ada perlu terus diperbarui dan ditingkatkan guna

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Kab. Karawang. (2018). Profil Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2018. In *www.KarawangKab.Go.id*.
- Hidayat, Y. R. (2016). Profil Karawang 2016. In *www.KarawangKab.Go.id* (Vol. 5, Issue 2, p. 39).
- Karawang, D. kesehatan kabupaten. (2016). *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2016-2021*.
- Karawang, P. K. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Karawang. *Perda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, 147*(March), 11–40.
- MULYADI, D. D., FADLI, U. M., & NINGSIH, F. C. K. (2013). Analisis Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Islam Karawang. *Jurnal Manajemen, 10*(3), 1203–1219.
- Qotrun Nada Sahroji, Rahmat Hidayat, R. N. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintah Dan Politik, 7*(1), 34–39.
- Ratnaningrum Dede, Hersona Sony, S. J. D. (2023). *Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. 8*(1), 480–486. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.783>
- Selly Ayudia, Banuara Nadeak, D. J. S. (2021). EVALUASI MUTU PELAYANAN PUSKESMASTERAKREDITASI BERDASARKAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG. *Jurnal Ilmiah Indonesia, 14*(1), 1–13.
- Usada, N. K., & Prabawa, A. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Data Sistem Informasi Puskesmas di Tingkat Dinas Kesehatan di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan, 2*(1), 16. <https://doi.org/10.51181/bikfokes.v2i1.5329>